

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Perangkat Daerah		: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)												
Tahun Penilaian		: 2024												
Tujuan Strategis		Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang Profesional Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkatkan												
Urusan Pemerintahan		: Urusan Penunjang Pemerintahan dan Tugas Perbantuan di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan												
No	"Risiko" yang Teridentifikasi		Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Analisis Risiko Sebelum			Analisis Risiko Setelah			Keterangan
	Program/kegiatan	Risiko	Tanggal terjadi	Sebab	Dampak			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko	
a	b		d	e	f	g	h	i	m	n	o	p	q	r
I Risiko Operasional														
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Urusan kelembagaan dan kelatalaksanaan tidak terlaksana	x	x	x		peningkatan kompetensi penyelenggara diklat, koordinasi dengan paniradya pati	4	2	13	3	2	11	turun
2	Peningkatan Budaya Pemerintahan	ASN tidak bersedia mengikuti diklat keistimewaan	x	x	x		peningkatan koordinasi internal, dan eksternal dalam penentuan kebutuhan sarana diklat	1	3	4	1	2	2	turun
3	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Peserta tidak lulus diklat keistimewaan	x	x	x		peningkatan kompetensi penyelenggara diklat, koordinasi dengan paniradya pati	4	2	13	3	2	11	turun
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan tidak sesuai ketentuan dan tidak tepat waktu	x	x	x		Melakukan koordinasi, dan meningkatkan intensitas monitoring terhadap kinerja PPTK	3	2	11	3	2	11	tetap
5	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan anggaran tidak berdasarkan kebutuhan	x	x	x		Meningkatkan intensitas monitoring dan koordinasi dengan PPTK	4	1	8	3	1	5	turun
6	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyajian perencanaan tidak tepat waktu	x	x	x		Meningkatkan intensitas monitoring dan koordinasi dengan PPTK	4	1	8	3	1	5	turun
7	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	x	x	x		Koordinasi dengan BKAD, meningkatkan komitmen dan kecermatan perencanaan	4	1	8	3	1	5	turun
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	penatausahaan keuangan tidak akuntabel	Juni 2024	Lemahnya Pengendalian Internal	Kerugian keuangan Daerah	Pemeriksaan Reguler Irda	Peningkatan kompetensi pegawai dan proses verifikasi berjenjang	4	2	13	4	2	13	tetap
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	penatausahaan keuangan tidak tepat waktu	x	x	x		Peningkatan kompetensi pegawai dan proses verifikasi berjenjang	4	1	8	3	1	5	turun

No	"Risiko" yang Teridentifikasi		Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Analisis Risiko Sebelum			Analisis Risiko Setelah			Keterangan
	Program/kegiatan	Risiko	Tanggal terjadi	Sebab	Dampak			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyajian administrasi kepegawaian tidak tepat waktu	x	x	x		peningkatan kompetensi dan komitmen pelayanan pegawai	4	1	8	3	1	5	turun
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	pelayanan administrasi umum tidak optimal	x	x	x		peningkatan kompetensi dan komitmen pelayanan pegawai	3	1	5	3	1	5	tetap
12	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan BMD Penunjang tidak optimal	x	x	x		Melakukan koordinasi, dan meningkatkan intensitas monitoring terhadap kinerja PPTK	3	1	5	3	1	5	tetap
13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kemahalan harga pengadaan	x	x	x		Peningkatan koordinasi dan internalisasi kode etik, dan penguatan pelaporan gratifikasi	3	2	11	3	1	5	turun
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan layanan penunjang Pemerintah Daerah tidak Optimal	x	x	x		Meningkatkan intensitas monitoring dan koordinasi dengan PPTK	3	2	11	3	1	5	turun
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	x	x	x		Menyusun skala prioritas	3	2	11	3	1	5	turun
16	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Keterlambatan dan ketidaktepatan layanan dan fasilitasi administrasi kepegawaian	x	x	x		Meningkatkan intensitas monitoring dan koordinasi dengan PPK, dan PPTK	3	2	11	3	1	5	turun
17	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	Jumlah formasi pegawai yang ditetapkan tidak sesuai dengan formasi yang diusulkan	x	x	x		Meningkatkan intensitas koordinasi internal dan eksternal	3	4	16	3	3	14	tetap
18	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	Jumlah calon pegawai yang diterima tidak sesuai dengan jumlah formasi yang ditetapkan.	x	x	x		Memperluas rumpun kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan	3	3	14	3	2	11	turun
19	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	Keterlambatan penerbitan SK Pensiun PNS	x	x	x		meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan PD	2	2	7	2	2	7	tetap
20	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	Keterlambatan dalam pembaruan data dan penyajian informasi kepegawaian.	x	x	x		Meningkatkan kompetensi petugas	3	1	5	3	1	5	tetap
21	Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian ASN	Kesalahan data kepegawaian yang di input	x	x	x		Meningkatkan intensitas monitoring, evaluasi dan pendampingan	4	2	13	3	2	11	turun

No	"Risiko" yang Teridentifikasi		Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Analisis Risiko Sebelum			Analisis Risiko Setelah			Keterangan
	Program/kegiatan	Risiko	Tanggal terjadi	Sebab	Dampak			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
22	Mutasi dan Promosi	Ketidaksesuaian kompetensi PNS dengan jabatan struktural yang diisi.	x	x	x		Meningkatkan komitmen pejabat yang berwenang	4	2	13	3	2	11	turun
23	Mutasi dan Promosi	Lambatnya proses mutasi keluar dan mutasi masuk Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	x	x	x		Meningkatkan monitoring dan evaluasi	3	3	14	3	3	14	tetap
24	Mutasi dan Promosi	Proses alih tugas dalam daerah tidak normatif	x	x	x		meningkatkan integritas pengelola kepegawaian	2	3	10	2	3	10	tetap
25	Mutasi dan Promosi	Keterlambatan penyelesaian proses kenaikan pangkat	Februari, April, Juni	data belum update dan kelengkapan berkas serta masa kerja belum terpenuhi sesuai ketentuan	Kerugian bagi ASN		Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi antara	3	2	11	3	2	11	tetap
26	Pengembangan Kompetensi ASN	Tidak terlaksananya pengiriman diklat struktural.	x	x	x		Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan TAPD	4	3	17	3	3	14	turun
27	Pengembangan Kompetensi ASN	PNS yang melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri tidak mempunyai surat tugas belajar mandiri	x	x	x		Meningkatkan intensitas penyampaian informasi tentang dampak kepegawaian yang akan merugikan PNS apabila tidak memiliki Surat Tugas Belajar Mandiri.	3	1	5	3	1	5	tetap
28	Pengembangan Kompetensi ASN	Tidak adanya PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar dengan biaya pemerintah baik pusat maupun daerah	x	x	x		Meningkatkan penyampaian informasi tentang manfaat tugas belajar bagi peningkatan karier PNS	1	2	2	1	2	2	tetap
29	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Keterlambatan penyampaian laporan kinerja PNS	April	keteledoran ASN akan kewajibannya	Kerugian bagi ASN		Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Admin dan Kepala Perangkat Daerah	4	2	13	4	2	13	tetap
30	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlambatnya pemberian penghargaan kepada pegawai yang berhak	x	x	x		Koordinasi intensif dengan Admin Perangkat Daerah	2	1	3	2	1	3	tetap
31	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tidak terlaksananya sosialisasi dan pembinaan disiplin	x	x	x		Memfaatkan akun resmi BKPPD untuk publikasi peraturan disiplin	1	2	2	1	2	2	tetap
32	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tidak terlaksananya penyelesaian kasus pelanggaran disiplin	x	x	x		Penambahan anggaran untuk tim penyelesaian kasus pelanggaran disiplin	2	1	3	2	1	3	tetap

No	"Risiko" yang Teridentifikasi		Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Analisis Risiko Sebelum			Analisis Risiko Setelah			Keterangan
	Program/kegiatan	Risiko	Tanggal terjadi	Sebab	Dampak			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	
33	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak terjadi peningkatan kompetensi SDM	x	x	x		Koordinasi dengan Perangkat Daerah	3	1	5	3	1	5	tetap
34	Pengembangan Kompetensi Teknis	Diklat teknis tidak terlaksana	x	x	x		Koordinasi dengan TAPD	3	1	5	3	1	5	tetap
II	Risiko Strategis							0	0					
	Tujuan: Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang Handal							0	0					
1	Sasaran: 1.1. Aparatur yang Kompeten dan Profesional Meningkat	Pelayanan administrasi kepegawaian tidak profesional	x	x	x		Sosialisasi peraturan kepegawaian	4	3	17	3	3	14	turun
2		0	0				0	0						



Gunungkidul, 27 Juni 2024

Plh. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

RENI LINAWATI, S.Sos
NIP. 197210311996032002